



Bentuk UPT Kawasan Malioboro

Gantikan Peran Dinas dan Instansi

JOGJA – Pemkot Jogja berencana membentuk sebuah lembaga khusus yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap kawasan Malioboro. Sebuah unit pengelola teknis (UPT) dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk menata kawasan Malioboro bersama stakeholder dan shareholder yang ada di sana.

Menurut Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, UPT ini akan menggantikan peran sejumlah dinas atau instansi yang selama ini ikut mengelola Malioboro. Selama ini, beberapa dinas seperti Disperindag, Dishub, Kimpraswil, BLH, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dintib, dan tiga kecamatan yang berbatasan dengan Malioboro belum bisa menjalankan fungsi secara maksimal mengelola kawasan tersebut.

"Selama ini mereka belum bisa fokus," kata Haryadi ditemui di Gedung DPRD Kota Jogja kemarin (30/3). Masing-masing dinas atau instansi itu selalu terfokus pada bidang garapnya



Haryadi Suyuti

sendiri-sendiri. Karena itu dengan dijadikan satu dalam UPT, kegiatan pengelolaan Malioboro akan lebih optimal.

Hanya, tambah Haryadi, kerja UPT ini tak akan optimal jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak yang ada di Malioboro. Seperti semua paguyuban dan komunitas yang bergantung kehidupan mereka di sepanjang Jalan Malioboro. Mereka inilah yang diharapkan menjadi lini depan penataan kawasan itu. Dia yakin, kerja

sama dengan komunitas dan paguyuban yang ada ini, revitalisasi kawasan Malioboro bisa dilakukan dengan baik.

Diakuiinya, saat ini beban Malioboro sudah terlalu berat. Tak hanya lalu lintas, jumlah pedagang dan pengguna jasa lain di kawasan itu sudah sangat padat. "Dan untuk mendukung terciptanya Malioboro yang nyaman dan aman itu, tidak ada kata lain kecuali dukungan dari semua yang ada di sana," tegasnya.

Kapan UPT ini dibentuk? Haryadi menjanjikan dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan. "Secepatnya akan kami wujudkan. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini sudah jalan," janjinya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai penataan Malioboro memerlukan sebuah badan khusus. Ketua Paguyuban Pedagang Malioboro Suryadi pernah mengatakan, di Malioboro perlu ada sebuah badan atau otorita khusus yang menangani. Dengan adanya badan ini, setiap persoalan yang terjadi tidak perlu dilimpahkan ke Pemkot Jogja. Cukup otorita ini yang menyelesaikan. **(din)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			
6. Badan Perencanaan Pembangunan			
7. Badan Lingkungan Hidup			

